

IMPLEMENTASI PROGRAM KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS
(Studi Kasus: Kampung KB Mekar Melati, Kelurahan Tambakrejo, Kota Semarang)

Tesalonika Sahindra*), Kushandajani**))
Email: tesalonikashndr.14@gmail.com

Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Jl. Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kode Pos 1269
Telepon: (024)7465407 Faksimile (024) 7465405
Website: <https://www.fisip.undip.ac.id/> Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRAK

Kampung KB menjadi kebijakan program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas masyarakat dan pembangunan keluarga. Kampung KB Mekar Melati yang terletak di Kelurahan Tambakrejo. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis implementasi program Kampung KB Mekar Melati serta mengidentifikasi faktor yang menjadi penghambat dan pendukung adanya implementasi. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan triangulasi dengan melibatkan seluruh aktor yang secara langsung terlibat dalam pelaksanaan Kampung KB Mekar Melati tahun 2023-2024. Penelitian menunjukkan bahwa dalam implementasinya masih terdapat salah satu pokok yang mendominasi, RKM tidak transparan, metode non MKJP masih dominan, tidak ada anggaran khusus bagi Kampung KB Mekar Melati sehingga kebergantungan dengan kegiatan lain, fasilitas yang kurang memadai, masyarakat masih kurang paham, dan minimnya dukungan dari lurah. Sedangkan faktor pendukungnya yaitu terdapat kader yang mumpuni, sosialisasi berjalan baik, hubungan dengan sektor lain yang baik, kader yang berkomitmen, dan pelaksanaan program sesuai SOP. Implementasi Kampung KB Mekar Melati masih banyak terjadi hambatan. Disarankan lurah mendukung sepenuhnya program ini, peningkatan sosialisasi mengenai Kampung KB Mekar Melati kepada masyarakat, peningkatan transparansi, peningkatan penyediaan fasilitas.

Kata Kunci: Kampung KB, Implementasi Kebijakan, Pembangunan Keluarga, Kualitas Hidup Masyarakat.

ABSTRACT

Kampung KB is a government program policy that aims to improve the quality of society and family development. Kampung KB Mekar Melati is located in Tambakrejo Sub-District. The purpose of this study was to analyze the implementation of the Kampung KB Mekar Melati

program and to identify factors that inhibit and support the implementation. This study uses George C. Edward III's policy implementation theory using a descriptive qualitative research method. Data collection through interview, observation, documentation, and triangulation by involving all actors who are directly involved in the implementation of Kampung KB Mekar Melati in 2023-2024. The study shows that in its implementation there is still the one poktan group that dominates, RKM is not transparent, the non-MKJP method is still dominant, there is no special budget for Kampung KB Mekar Melati so that is dependent on other activities, inadequate facilities, the community still doesn't understand, and minimal support from the village head. While the supporting factors are the presence of qualified cadres, good socialization, good relations with other sectors, committed cadres, and program implementation according to SOP. The implementation of Kampung KB Mekar Melati still encounters many obstacles. It is recommended that the village head fully support this program increase socialization regarding the Kampung KB Mekar Melati to community, increase transparency, and improve the provision of facilities.

Key Words: *Kampung KB, Policy Implementation, Family Development, Community Quality of Life.*

PENDAHULUAN

Pertumbuhan penduduk menjadi salah satu permasalahan global yang paling krusial dan sering menjadi topik pembahasan yang menarik bagi negara-negara lainnya dimana akan memunculkan berbagai masalah seperti kemiskinan yang semakin tinggi, lapangan kerja yang tidak sesuai dengan penawaran, serta kualitas SDM yang kurang memadai. Pada masa Orde Baru dibawah kepemimpinan Presiden Soeharto kebijakan program KB dianggap berhasil. Akan tetapi, pada masa kini kebijakan tersebut berjalan kurang baik sehingga dapat menghambat peningkatan kualitas penduduk. Pertumbuhan penduduk menyebabkan pemerintah terus berupaya

untuk meningkatkan kualitas penduduk dan pembangunan nasional.

Kepemimpinan Joko Widodo dan Jusuf Kalla melahirkan salah satu program dalam rangka peningkatan kualitas penduduk dan pembangunan keluarga yaitu Kampung KB yang mulai diimplementasikan di Indonesia pada 14 Januari 2016 dimana program tersebut menjadi salah satu agenda prioritas Nawacita dengan menekankan pada poin agenda prioritas ketiga, kelima, dan kedelapan. Implementasi Kampung KB di Indonesia termuat dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas. Pada mulanya

bernama Kampung Keluarga Berkualitas yang kemudian pada tahun 2020 diganti menjadi Kampung Keluarga Berkualitas dengan alasan karena program ini tidak memfokuskan pada program KB saja, tetapi juga memfokuskan peningkatan kualitas masyarakat mulai dari balita hingga lansia.

Indikator keberhasilan Kampung KB diantaranya adalah adanya pokja dan kader, terdapat data kependudukan dan pembangunan keluarga yang valid, serta adanya dukungan dari pemerintah setempat dan lintas sektor. Dalam rangka mensukseskan program tersebut diperlukan adanya dukungan dari pemerintah setempat, para kader, PLKB, kerja sama dengan mitra lain, dan partisipasi masyarakat. Pelaksanaan kegiatan Kampung KB diantaranya adalah poktan dan pelayanan KB. Poktan terbagi menjadi 5 yaitu BKB (Bina Keluarga Balita), BKR (Bina Keluarga Remaja), BKL (Bina Keluarga Lansia), PIK-R (Pusat Informasi dan Konseling Remaja), dan UPPKA (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor).

Berdasarkan Inpres Nomor 3 Tahun 2022, Kampung KB diimplementasikan di Kota Semarang yang dilaksanakan secara serentak pada tahun 2023 dibawah naungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana (Disdalduk KB) Kota Semarang. Aturan pelaksanaan Kampung KB dilaksanakan di level pemerintahan terbawah yaitu pada level desa/ kelurahan. Salah satu Kampung KB di Kota Semarang yang menjadi penelitian ini adalah Kampung KB Mekar Melati yang terletak di Kelurahan Tambakrejo, Kecamatan Gayamsari. Kampung KB Mekar Melati mulai diimplementasikan pada tahun 2023 berdasarkan SK Lurah Tambakrejo Nomor 411.4/53/XII/Tahun 2022. Pelaksanaan Kampung KB Mekar Melati memenuhi syarat sebagai wilayah 3T yaitu sebagai wilayah tertinggal dengan kemiskinan tinggi dan rentan terjadi bencana rob/ banjir. Penelitian terkait implementasi program Kampung KB Mekar Melati difokuskan pada tahun 2023-2024.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana implementasi program Kampung KB Mekar Melati di Kelurahan Tambakrejo?
2. Apa saja faktor penghambat dan pendukung implementasi Kampung KB Mekar Melati di Kelurahan Tambakrejo?

TUJUAN PENELITIAN

Menganalisis implementasi program Kampung KB Mekar Melati di Kelurahan

Tambakrejo. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor penghambat dan pendukung implementasi Kampung KB Mekar Melati.

KERANGKA TEORITIS

1. Teori Implementasi Kebijakan

Implementasi adalah sebuah proses untuk melaksanakan suatu program kegiatan setelah ditetapkannya kebijakan oleh lembaga/ badan tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sehingga adanya implementasi ini menjadi peran yang sangat penting dalam suatu kebijakan untuk menentukan tingkat keberhasilan dan kegagalannya. Menurut Mazmanian dan Sabatier (1979) implementasi kebijakan dapat menimbulkan dampak nyata di masyarakat. Sementara itu, menurut Van Meter dan Van Horn implementasi menjadi tindakan dalam keputusan sebelumnya yang mengartikan bahwa implementasi dapat mempengaruhi perubahan kecil hingga besar. Implementasi memerlukan 3 hal utama yaitu terdapat program yang dilaksanakan, adanya sasaran terhadap implementasi program, dan adanya implementator yang bertanggung jawab. Supaya dapat menjelaskan makna implementasi lebih dalam terdapat indikator

implementasi menurut teori George C. Edward III (dalam Subarsono, 2011):

a. Komunikasi

Adanya komunikasi supaya dalam implementasi program tidak terjadi kesalahpahaman sehingga implementator dapat mengetahui dan memahami informasi yang diberikan. Proses komunikasi terbagi menjadi 2 yaitu komunikasi formal dan komunikasi non formal.

b. Sumberdaya

Sumber daya dapat meliputi SDM (manusia), dana/ anggaran, sarana prasarana (fasilitas), dan sektor lain. Aspek tersebut tidak dapat dipisahkan, sehingga apabila salah satunya tidak terpenuhi maka akan menimbulkan implementasi yang buruk.

c. Disposisi/ Watak

Sikap dari implementator dapat mempengaruhi keberjalanan implementasi kebijakan apakah implementator menyikapinya dengan baik atau buruk. Watak tersebut dapat menjadi cerminan hasil suatu program.

d. Struktur Birokrasi

Berfokus pada sistem organisasi, prosedur, dan koordinasi/ kerjasama dengan lembaga yang bersangkutan. Pada pelaksanaannya, struktur birokrasi harus berlandaskan pada SOP (*Standard Operating Procedure*).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pengambilan sampelnya yaitu *purposive sampling*. Lokasi penelitian berada di Kelurahan Tambakrejo dengan subjek penelitiannya adalah seluruh aktor yang terlibat dalam Kampung KB Mekar Melati. Informasi digali lebih jauh dengan menggunakan wawancara, dokumentasi, observasi, dan triangulasi. Lebih dalam informasi dapat menggunakan buku, jurnal, dokumen resmi pemerintah, dan *website* Kampung KB Mekar Melati. Untuk menganalisis data peneliti menggunakan reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Komunikasi yang Terjalin Antar Aktor

Kampung KB di Kota Semarang yang mulai dilaksanakan secara serentak tahun pada tahun 2023 dilaksanakan pada masing-masing kelurahan sehingga Kampung KB di Kota Semarang saat ini berjumlah 177. Informasi pelaksanaan Kampung KB serentak di Kota Semarang disampaikan oleh Disdalduk KB Kota Semarang kepada para lurah. Informasi tersebut tidak hanya penyampaian pelaksanaan saja, tetapi juga dari tujuan dan manfaat diadakannya program Kampung

KB. Pembentukan Kampung KB Mekar Melati tidak terlepas dari adanya komunikasi antara lurah dengan calon kader. Setiap kader yang terpilih kemudian diinformasikan oleh lurah melalui media WhatsApp. Setelah adanya pembentukan kader, PLKB Kecamatan Gayamsari memberikan informasi kepada kader dan lurah terkait *website*, sistem pelaporan (SIGA), serta kegiatan dari Kampung KB supaya keberjalanan Kampung KB tetap berada sesuai SOP.

Kader Kampung KB Mekar Melati mengadakan pertemuan rutin setiap bulannya untuk menginformasikan undangan kegiatan serta pelaporan kader terutama dari kader poktan dan kader KB. Agenda rapat rutin tersebut khususnya ditujukan apabila terdapat undangan kegiatan bagi masyarakat diharapkan kader yang bersangkutan dapat secara jelas menerima informasi tersebut. Masyarakat yang terlibat dalam pelayanan KB sudah cukup baik karena undangan kegiatan yang mereka terima dari kader sudah tersampaikan secara jelas meskipun dominasi PUS masih menggunakan metode non-MKJP yaitu suntik. Sementara itu, masyarakat yang terlibat dalam poktan (kelompok kegiatan) belum sepenuhnya memahami seluruh poktan yang ada di

Kampung KB Mekar Melati karena keterbatasan informasi. Maka dari itu, menimbulkan *misscommunication* yang menyebabkan dominasi kegiatan BKB (Bina Keluarga Balita) sedangkan sangat minim kegiatan UPPKA (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor). Adanya fenomena tersebut mendapat tanggapan dari masyarakat bahwasannya UPPKA harus lebih digenjot. Akan tetapi, belum ada respon dari pihak kader Kampung KB Mekar Melati.

SIGA menjadi alat komunikasi lainnya yang berbasis *online*. SIGA menjadi bukti pelaporan dari kader kepada PLKB Kecamatan Gayamsari dan Disdalduk KB Kota Semarang. Melalui SIGA dapat dilakukan pemantauan, sehingga ketika ada data yang masih kurang dapat diinformasikan kepada kader.

2. Ketersediaan Sumberdaya

Supaya kader Kampung KB Mekar Melati dapat menjalankan tugasnya dengan baik, maka diperlukan sosialisasi dari pihak Disdalduk KB Kota Semarang dan PLKB Kecamatan Gayamsari. Meskipun sosialisasi sudah berjalan dengan baik, tetapi apabila dari kuantitas pengurus Kampung KB Mekar Melati masih minim maka pelaksanaan program kurang maksimal. Ditunjukkan bahwa masih terbatasnya 9 orang pokja

dengan 2 orang yang terlatih serta keterbatasan sekretaris yaitu 1 orang aktif. Minimnya pokja menyebabkan tidak tersedianya RKM (Rencana Kegiatan Masyarakat) pada *website* Kampung KB Mekar Melati. Akan tetapi, dari segi kader sudah jauh lebih baik dan mumpuni.

Permasalahan lainnya adalah tidak terdapat anggaran khusus bagi pelaksanaan Kampung KB Mekar Melati sehingga pelaksanaan kegiatan program belum dikatakan maksimal. Anggaran program masih menggunakan dana swadaya (dana pribadi) dari para kader. Pelaksanaan kegiatan masyarakat terutama pada poktan BKL, BKR, PIK-R, dan UPPKA masih menggantung dengan lembaga-lembaha yang sedang melaksanakan kegiatan. Berbeda halnya terhadap poktan BKB dan pelayanan KB yang sudah terjalin kerjasama dengan sektor lain yaitu posyandu balita, Muyan (Mobil Pelayanan), klinik, dan rumah sakit. Tidak adanya anggaran juga menyebabkan sekretaris harus menggunakan dana pribadinya untuk *upload* pelaporan Kampung KB Mekar Melati di SIGA.

Fasilitas sekretariat Kampung KB Mekar Melati masih dianggap kurang karena masih menjadi satu dengan kantor kelurahan. Akan tetapi, saat ini fungsi sekretariat sangat berkurang karena kegiatan

pertemuan rutin kader condong bergilir dari rumah ke rumah kader.

3. Sikap Pelaksana Dalam Merespon Program

Dalam mengimplementasikan program Kampung KB Mekar Melati dibutuhkan pengambilan sikap yang baik. Komitmen dari para kader Kampung KB Mekar Melati sudah dinilai cukup baik karena dari masa awal penunjukan hingga pada saat menjadi implementator program dilakukan dengan penuh tanggung jawab yang ditunjukkan dengan rutin mengikuti kegiatan serta melakukan pelaporan. Berbeda halnya dengan motivasi dari masyarakat Kelurahan Tambakrejo, mereka lebih cenderung kurang antusias terhadap program ini karena masih banyak yang belum tahu dengan adanya program ini sehingga partisipasi di poktan BKR, BKL, PIK-R, dan UPPKA masih sangat minim.

Pemerintah setempat yaitu lurah juga masih kurang memahami program Kampung KB Mekar Melati. Beliau hanya sekedar mengetahui tujuan utama dari program ini dengan alasan karena banyaknya program kegiatan di Kelurahan Tambakrejo. Hal ini menyebabkan dorongan dari lurah masih sangat minim dan belum menjadi program prioritas di Kelurahan Tambakrejo.

Kader yang langsung terjun ke masyarakat yaitu kader KB dan kader poktan telah melakukan tugasnya dengan baik. Kader KB dengan pemahamannya mengenai pelayanan KB mengambil sikap bijak dengan menginformasikan pentingnya KB kepada masyarakat sehingga banyak masyarakat yang antusias untuk berpartisipasi. Sedangkan dari poktannya banyak masyarakat yang antusias untuk mengikuti kegiatan BKB setiap bulan karena jumlah balita yang sangat banyak di Kelurahan Tambakrejo.

Penyikapan terhadap program ini tidak hanya dilakukan pada internal Kampung KB Mekar Melati saja, tetapi juga peran dari PLKB Kecamatan Gayamsari dan Disdalduk KB Kota Semarang. PLKB Kecamatan Gayamsari memberikan dorongan untuk melakukan monitoring dan evaluasi serta membantu kader ketika mengalami kendala, sedangkan dari Disdalduk KB Kota Semarang memberikan dorongan dengan mengadakan lomba antar Kampung KB Kota Semarang berdasarkan indikator keberhasilan BKKBN.

4. Peran Struktur Birokrasi Terhadap Pelaksanaan Program

Pelaksanaan Kampung KB mengenal adanya pembagian tugas supaya tidak terjadi tumpang tindih. PLKB Kecamatan

Gayamsari menerapkan pembagian tugas dimana 1 PLKB bertanggung jawab atas 2-3 kelurahan. Hal tersebut juga dilakukan pada internal Kampung KB Mekar Melati bahwasannya pada awal pembentukan Kampung KB Mekar Melati telah dilakukan pembagian tugas oleh lurah sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Pada internal kader juga telah mengenal pembagian tugas supaya pelaksanaan program Kampung KB Mekar Melati dapat berjalan secara maksimal terutama pada kader poktan dan kader KB yang langsung turun ke masyarakat. Kader poktan masih membagi pelaksanaan poktan di masing-masing wilayah Kelurahan Tambakrejo supaya lebih mudah dihandle. Sedangkan kader KB turut membagi menjadi kader KB tingkat RT, RW, dan kelurahan.

Dalam implementasinya telah sesuai dengan SOP. Pada saat kegiatan berlangsung, kader yang bertanggung jawab melakukan pelaporan data secara manual, hingga sekretaris yang melakukan pelaporan data melalui SIGA (*online*) semuanya sudah sesuai dengan aturan. Kemudian digunakan sebagai bahan pelaporan kepada tingkat yang lebih atas.

Masyarakat berperan untuk mengambil keputusan selanjutnya dengan menyarankan kegiatan kedepannya kepada

para kader. Dari masukan tersebut kemudian diadakan senam sehat bagi lansia. Meskipun masyarakat juga dilibatkan dalam pelaksanaan program Kampung KB Mekar Melati, tetapi transparansi dan akuntabilitas kader kepada masyarakat dikatakan belum baik. Hal tersebut ditunjukkan bahwa *website* yang dikelola oleh Kampung KB Mekar Melati belum ada kelengkapan seperti tidak adanya RKM, tidak ada bukti video pelaksanaan kegiatan, serta belum terdapat data hasil kegiatan. Tidak lengkapnya transparansi dan akuntabilitas tersebut disebabkan karena laporan hasil kegiatan yang masih sedikit.

KESIMPULAN

Implementasi program Kampung KB Mekar Melati di Kelurahan Tambakrejo dikatakan belum sesuai dengan indikator keberhasilan Kampung KB karena masih banyak faktor yang menghambat di dalam pelaksanaannya. Faktor penghambat itu tidak hanya dari satu faktor saja, tetapi banyak aktor. Dimulai dari aspek komunikasi yang ditunjukkan informasi terkait Kampung KB Mekar Melati masih kurang merata. Aspek sumber daya kuantitas dan kualitas pengurus masih kurang, belum terdapat anggaran yang menyebabkan terhalangnya pelaksanaan kegiatan, fasilitas minim, pelaksanaan kelompok kegiatan

belum sepenuhnya didukung sektor lain, sikap dari pemerintah setempat yang masih kurang, serta minimnya transparansi terkait Kampung KB Mekar Melati.

luas dengan sektor lain untuk meningkatkan pelaksanaan kegiatan.

SARAN

Penelitian ini memberikan saran dari hambatan yang masih terjadi dalam pelaksanaan program Kampung KB Mekar Melati.

1. Lurah dan kader Kampung KB Mekar Melati harus lebih berinisiatif untuk meningkatkan komunikasi dan sosialisasi kepada masyarakat Kelurahan Tambakrejo perihal tujuan, manfaat, serta pelaksanaan kegiatan program Kampung KB.
2. Dari internal kepengurusan harus lebih meningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga pokja Kampung KB Mekar Melati yang terlatih terutama dalam hal untuk perancangan RKM.
3. Meningkatkan fungsi sekretariat Kampung KB Mekar Melati yang berada di kantor kelurahan.
4. Lurah tidak hanya sekadar mengetahui tetapi juga harus memahami pelaksanaan Kampung KB Mekar Melati.
5. Kader Kampung KB Mekar Melati lebih membangun hubungan yang

DAFTAR PUSTAKA

- Asnani, & Shodiq, M. (2022). Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Kampung Berkualitas Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Bestari*, 2(2), 1–2.
- Asnani, & Shodiq, M. (2022). Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Kampung Berkualitas Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Bestari*, 2(2), 1–2.
- BKKBN. (2023). Sosialisasi Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB). BKKBN. [https://kampungb.bkkbn.go.id/kampung/14646/intervensi/565228/sosialisasi-kampung-keluarga-berkualitas-kampung-kb#:~:text=Berdasarkan Surat Edaran Kemendagri No,penyelenggaraan Kampung KB belum maksimal](https://kampungb.bkkbn.go.id/kampung/14646/intervensi/565228/sosialisasi-kampung-keluarga-berkualitas-kampung-kb#:~:text=Berdasarkan%20Surat%20Edaran%20Kemendagri%20No,penyelenggaraan%20Kampung%20KB%20belum%20maksimal.). Diakses pada 9 November 2024.
- Cicinta. (2023). Operasional Ketahanan Keluarga Berbasis Poktan. BKKBN. <https://kampungb.bkkbn.go.id/kampung/2007/intervensi/589691/operasional-ketahanan-keluarga-berbasis-poktan>. Diakses pada 12 November 2024.
- Fathina, H. (2022). Simak Daftar dan Karakteristik Negara Berkembang di Dunia. *Bisnis.Com*. <https://ekonomi.bisnis.com/read/202209/1580487/simak-daftar-dan-karakteristik-negara-berkembang-di-dunia>. Diakses pada 25 September 2024.
- Hasriani, Yunus, R., & Hamsinah. (2021). Implementasi Program Kampung Keluarga Berkualitas di Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan. *Spirit Publik*, 16(2), 138–148.
- Kadji, Y. (2015). *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas*. UNG Press Gorontalo.
- Maleke, T. S., Pangkey, M., & Tampongangoy, D. (2022). Efektivitas Program Kampung Keluarga Berencana (KB) Di Desa Temboan Kecamatan Maesaan Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Administrasi Publik JAP*, VIII(2), 106–107. <https://doi.org/https://doi.org/10.35797/jap.v8i2.40321>. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/JAP/article/view/40321>
- Ninawati, Liska, F., Tiara, V., & Barella, Y. (2024). Menyelami Tren Populasi Dunia: Fakta, Angka, dan Implikasinya. *SOSIAL: Jurnal Ilmiah Pendidikan IPS*, 2(3), 1–2. <https://doi.org/https://doi.org/10.62383/sosial.v2i3.248>
- Pramono, J. (2020). Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik (Sutoyo (Ed.)). Unisri Press.
- Rahmadhony, A., & Gayatri, M. (2021). Politik Hukum Program Keluarga Berencana di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51(3), 579–581. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no3.3124>
- Rofik. (2021). *Nawa Cita atau Nawacita*. SNI Gresik. <https://www.nawacitagresik.id/2021/10/nawa-cita-atau-nawacita-adalah.html>. Diakses pada 12 November 2024.